



**PEMBINAAN PENGAMEN EKSENTRIK PADA KAWASAN PUBLIK
KABUPATEN BANYUWANGI SEBAGAI UPAYA PERUBAHAN DARI
KEMISKINAN MENUJU KESEJAHTERAAN**

*Guidance Of Eccentric Buskers In Public Areas Of Banyuwangi Regency As
An Effort To Change From Poverty Towards Prosperity*

Wardah Rifkah Majidah¹, Safrieta Jatu Permatasari², Hary Priyanto³

^{1,2,3}**Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi**

Email: wardahrifkah2603@gmail.com

Email: safrieta@untag-banyuwangi.ac.id

Email: harysangabi@gmail.com

Abstract

The existence of eccentric buskers has become a social problem that is simultaneously prevalent in Banyuwangi Regency. They carry out their activities in a different way from buskers in general, in terms of their appearance and character as silver humans, robots, clowns, or dance artists, including being different from their personal behavior when they are ordinary people. The efforts of eccentric buskers to capitalize on their misery have an impact on personal gain, while also disrupting the spirit of the Banyuwangi Regency Government in urban planning and empowerment programs that are just and prosperous. The research is based on a qualitative descriptive approach. The purpose of the research is to describe and analyze the role of the Banyuwangi Regency Social Service, Women's Empowerment and Family Planning in dealing with eccentric buskers in Banyuwangi Regency. The conclusion of the research is that the Banyuwangi Regency Government through the Social Service, Women's Empowerment and Family Planning has made efforts to deal with eccentric buskers through empowerment policies and programs in order to improve welfare, maintain public order, and eliminate negative stigma from society. Research recommendation, Social Service, Women Empowerment and Family Planning of Banyuwangi Regency in implementing the program needs a holistic approach and cross-sector collaboration, so that eccentric buskers are able to escape the cycle of poverty, and do not return to activities in public areas illegally.

Keywords: Eccentric Buskers; Welfare Level; Empowerment Effectiveness

Abstrak

Keberadaan pengamen eksentrik menjadi permasalahan sosial yang menggejala secara simultan di Kabupaten Banyuwangi. Mereka beraktivitas dengan cara berbeda dengan pengamen pada umumnya, ditinjau dari penampilan dan karakter sebagai manusia silver, robot, badut, maupun seni tari, termasuk berbeda dengan perilaku kehidupan pribadinya saat menjadi masyarakat biasa. Upaya pengamen eksentrik mengkapitalisasi kesengsaraannya berdampak pada keuntungan pribadi, sekaligus mengganggu semangat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam penataan kota dan program pemberdayaan yang berkeadilan dan mensejahterakan. Penelitian berprinsip pada pendekatan deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian untuk mendeskripsi serta menganalisis peran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi dalam menangani pengamen eksentrik di Kabupaten Banyuwangi. Kesimpulan penelitian, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana telah berupaya menangani pengamen eksentrik melalui kebijakan

dan program pemberdayaan demi meningkatkan kesejahteraan, menjaga ketertiban publik, dan menghilangkan stigma negatif dari masyarakat. Rekomendasi penelitian, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi dalam implementasi program perlu dengan pendekatan holistik dan kolaborasi lintas sektor, agar pengamen eksentrik mampu keluar dari lingkaran kemiskinan, dan tidak kembali beraktivitas di kawasan publik secara liar.

Kata Kunci: Pengamen Eksentrik; Tingkat Kesejahteraan; Efektivitas Pemberdayaan

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah serius dalam kehidupan masyarakat. Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidak-mampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup masyarakat di suatu daerah. Pemerintah punya peran penting menangani masalah kemiskinan pangan, sandang, serta papan yang dialami masyarakat. Penyebab kemiskinan karena aspek ketidak berdayaan seseorang pada usia kerja, sulit mendapat pekerjaan, dan karena aspek individu (Safinah et al., 2024). Tingkat kemiskinan menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh yang kemudian dapat menjadikan setiap orang untuk melakukan segala upaya agar tetap melanjutkan kehidupannya (Nugraha et al., 2023).

Permasalahan kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi bersifat kompleks dan dinamis. Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi, angka kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi tahun 2024 sebesar 6,54 % dimana Kabupaten Banyuwangi berada di peringkat 12 terendah di Jawa Timur. Namun angka kemiskinan pada tahun 2024 ini mengalami perubahan sebesar -0,80 % dari tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 sebesar 0,17%. Makenya, penuntasan kemiskinan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi cukup berhasil, meski dalam diskursus tertentu masih ada 21.785% penduduk miskin ekstrem yang harus dituntaskan.

Tabel 1 Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Banyuwangi, 2020-2024

Thn	Garis Kemiskinan /GK (rupiah per kapita sebulan)	Perubahan GK	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Perubahan Jumlah Miskin (ribu jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (Po)	Perubahan (Po)
2020	373.679	19.806	130,37	9,00	8,06	0,54
2021	387.084	13.405	130,93	0,55	8,07	0,01
2022	414.879	27.795	122,01	-8,92	7,51	-0,56
2023	448.928	34.049	119,52	-2,49	7,34	-0,17
2024	470.713	21.785	106,61	-12,91	6,54	-0,80

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi (2024)

Sulitnya seseorang mencari pekerjaan membuat sebagian orang memilih cara mudah memenuhi kebutuhan hidup. Salah satunya dengan menjadi pengamen di area *traffic light*, bermodal alat musik ala kadarnya atau bertindak eksentrik yaitu dengan cara menjadi manusia silver, menggunakan kostum seni tari hingga kostum boneka. Istilah pengamen eksentrik karena punya gaya atau penampilan unik dan berbeda dari pengamen pada umumnya demi menarik perhatian masyarakat sekitar, serta cenderung interaktif dengan pengendara motor untuk menciptakan suasana lebih hidup dan energik. Bagi pengamen eksentrik,

mengamen dengan pola unik merupakan representasi kebebasan berekspresi dari dunia seni pertunjukan ke ruang publik.

Pengamen dengan model eksentrik merupakan dampak dari pola kepribadian yang dimiliki. Umumnya pengamen eksentrik termasuk orang dengan kreatif dan ekspresif, meskipun banyak kalangan yang menganggap hal tersebut merupakan hal aneh. Model eksentrik dianggap sebagai salah satu penyimpangan sosial dalam masyarakat yang tidak melanggar norma-norma hukum, hanya melanggar norma-norma sosial. Meski demikian, keberadaan pengamen eksentrik di area *traffic light* di Kabupaten Banyuwangi terus bertambah, tidak dibatasi usia serta jenis kelamin, dan lokasinya semakin meluas. Pengamen eksentrik tidak hanya mencari rejeki di area *traffic light*, namun juga di tempat ibadah, rumah makan, perkantoran, hingga rumah-rumah warga. Dampak keberadaan pengamen eksentrik adalah menambah kemacetan, terlihat kumuh, mengurangi kenyamanan, dan pola provokatif yang menggambarkan suatu daerah dengan realitas kemiskinan dan tidak ramah anak.

Diskursus keberadaan pengamen eksentrik mengarah pada perspektif negatif dan positif. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi harus menjamin hak dan kewajiban asasi warga negara dan rakyatnya dalam konstitusi negara (Priyanto, 2024). Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi harus turun untuk melakukan pembinaan dan pemberdayaan dalam rangka menangani kemiskinan dan kesejahteraan sosial, khususnya yang melibatkan anak bawah umur atau usia produktif sekolah. Fakir miskin berhak mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya (Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 2 tahun 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsi dan menganalisis peran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi dalam menangani keberadaan pengamen eksentrik di area *traffic light* Banyuwangi. Selain daripada hal tersebut, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai literatur penting dalam pengembangan ilmu administrasi, khususnya terkait program kebijakan pemberdayaan dalam pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan. Manfaat penelitian ini sebagai kontribusi pemikiran untuk menjadi bahan pertimbangan dan/atau masukan bagi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi terkait program pemberdayaan yang berkelanjutan, dan sebagai pemikiran baru untuk program pelayanan publik agar terjalin kolaborasi antara Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi dengan segenap komponen masyarakat demi meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pemilihan pendekatan tersebut sesuai karakteristik fleksibilitas yang tinggi pada metode kualitatif, sehingga peneliti dapat mengeksplorasi fenomena yang kompleks dan dinamis, dan memahami makna yang terkandung dari yang di dapat secara individu atau kelompok secara ilmiah. Dalam pandangan Moleong (dalam

Shiddiqi, et al., 2024), pendekatan kualitatif sesuai prinsip fenomenologis yang mendukung apresiasi dengan mencoba menilai dan menafsirkan signifikansi suatu peristiwa interaksi perilaku manusia pada situasi tertentu.

Tujuan penelitian ini untuk memperoleh informasi terkait peran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi dalam menangani pengamen eksentrik di area *traffic light* Banyuwangi. Diharapkan dengan pendekatan kualitatif dapat mengungkap situasi dan masalah program pemerintah (Anjarwati, et al., 2023), sehingga memungkinkan peneliti menggunakan intuisi dan pemahaman pribadi dalam proses analisis data, sehingga peneliti berkesempatan mengembangkan wawasan yang lebih mendalam dan dapat mengaitkan temuan penelitian dengan teori yang relevan. Peneliti menganggap jika pendekatan kualitatif deskriptif tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan dan menganalisis data, namun juga sebagai sarana untuk membangun pengetahuan yang lebih holistik dan kontekstual mengenai fenomena yang diteliti (Ekawati, et al., 2024). Secara keseluruhan, penggunaan pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang lebih kaya dan bermakna, serta memberikan kontribusi yang signifikan dan pemahaman yang lebih baik mengenai masalah yang dikemukakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembinaan Pengamen Eksentrik

Pengamen eksentrik merupakan aktivitas orang dalam mencari nafkah dengan melakukan suatu pertunjukan seni tari maupun musik berdasarkan gaya atau cara mengamen yang unik, aneh, tidak biasa, dan membedakan diri dari pengamen lainnya sehingga dapat menarik perhatian. Aktivitas pengamen secara eksentrik tidak melihat umur dan jenis kelamin, sebab tujuannya mencari nafkah ataupun memenuhi kebutuhan keluarga atau pribadi.

Kemiskinan menyebabkan orang melakukan aktivitas mengamen secara eksentrik. Kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal yang meliputi kebutuhan makanan maupun non makanan dari standar hidup tertentu. Permatasari (2022) menjelaskan, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan umum yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan.

Penelitian lapangan menjelaskan pengamen eksentrik yang melakukan pertunjukan karya seni musik maupun tari di muka umum, biasanya diadakan di jalan raya dan trotoar area *traffic light* atau dimanapun yang ada khalayak ramai agar pengendara atau orang di sekitar menonton. Dampaknya, arus jalan raya dan kenyamanan orang terganggu (Hasil wawancara, 2025).

Peneliti menganggap jika kegiatan yang dilakukan pengamen eksentrik dengan pertunjukan karya seni tersebut bertujuan untuk mendapatkan uang demi memenuhi kebutuhannya. Gobel (dalam Habibullah, et al., 2008); Syani (dalam Zaki, 2013) menyatakan motif ekonomi yang dimaksud pada aktivitas pengamen jalanan adalah untuk memenuhi kebutuhan fisiologisnya yaitu kebutuhannya untuk mempertahankan hidupnya secara fisik yang meliputi kebutuhan akan

sandang, pangan, dan papan. Meski demikian keberadaan pengamen eksentrik sering dihadapkan pada stigma negatif dari masyarakat, baik karena mengganggu kenyamanan orang maupun jika ada pengamen eksentrik berusia muda atau masa produktif sekolah. Pandangan terhadap pengamen eksentrik di Kabupaten Banyuwangi di usia muda memang tergantung pada sudut pandang individu dan konteksnya. Sebagian masyarakat melihat fenomena tersebut sebagai cara ekspresi seni yang kreatif atau sebagai cara untuk mengatasi kesulitan keuangan dalam keperluan hidupnya sendiri dan/atau membantu perekonomian keluarga, namun pada satu sisi itu aktivitas mengamen sebagai upaya kapitalisasi dalam merusak citra Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang mempromosikan spirit kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian lapangan, aktivitas pengamen eksentrik mencari jalan cepat dalam meningkatkan perekonomian karena lambatnya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam memberi akses pemberdayaan dan lowongan pekerjaan (hasil wawancara, 2025).

Berdasarkan analisis peneliti, potensi seni, musik, atau pertunjukan yang dimiliki pengamen eksentrik memungkinkan untuk mengekspresikan dan mendapat uang. Bagi orang-orang yang punya bakat seni, mengamen adalah kegiatan menyenangkan sebab bisa menyalurkan hobi mereka (Pratiwi, et al., 2024). Meskipun pendapatan dari mengamen tidak pasti dan bervariasi, namun aktivitas mengamen dengan model eksentrik memudahkan mendapat uang dengan cepat. Pengamen memilih model eksentrik karena fleksibilitasnya. Mereka bekerja dengan menggunakan alat musik yang dikuasai atau bahkan tanpa menggunakan peralatan khusus dan biaya modal yang tinggi. Selain itu, mereka dapat berpindah lokasi sesuai dengan keinginan.

Secara harfiah mengamen merupakan suatu aktivitas, tetapi bila ditelaah mendalam, aktivitas pengamen eksentrik merupakan kedok dari kegiatan meminta-minta. Diskursus tersebut sebagai sintesis bahwa aktivitas mengamen sulit memberikan sumbangsih yang berarti terhadap pembangunan berkelanjutan yang digagas Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, karena keberadaannya justru mengganggu keharmonisan, ketertiban, keberlanjutan, penampilan dan norma masyarakat. Sebab pada dasarnya setiap orang punya potensi dan kemampuan untuk mempertahankan hidup dan memenuhi kebutuhan keluarganya secara baik selain mengkapitalisasi kesengsaraannya (Utami, et al., 2023).

Menurut Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, dalam satu hari pengamen penari Gandrung dapat meraup keuntungan Rp 200 hingga 1 juta. Pengamen tersebut memiliki 2 rumah serta kendaraan pribadi (rubicnews, 2025, 25 April; Hasil wawancara, 2025).

Peneliti berpendapat, adanya fakta temuan tentang kemampuan ekonomi pengamen eksentrik tersebut merupakan penjelasan bahwa tidak serta merta pengamen memiliki tingkat kesejahteraan rendah, tetapi tentang rutinitas dan kenyamanan beraktivitas. Oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana perlu melakukan pembinaan terhadap pelaku pengamen eksentrik melalui program pemberdayaan. Osborne dan Plastik (dalam Madhania, et al., 2023) yang menyatakan pemerintah sebagai lembaga yang besar dan kompleks. Agar

implementasi program pemberdayaan berhasil sesuai harapan maka harus disertai dengan pola kerja yang sejalan pada tujuan (Azizah, et al., 2025). Karena program pemberdayaan tidak hanya tentang memberikan pelatihan lantas berwirausaha atau mendapat pekerjaan dari pihak lain, tetapi juga agar pelaku pengamen eksentrik sebagai penerima program pemberdayaan tidak kembali beraktivitas sebagai pengamen, yang sebenarnya mengancam keamanan, kesehatan, dan masa depan yang bermartabat.

Implementasi program pemberdayaan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana untuk menyelesaikan masalah bukan menambah beban masalah. Temuan tentang tingkat perekonomian pengamen eksentrik sebagai penjas bahwa aktivitas tersebut tidak tentang target kesejahteraan, tetapi tentang fraud. Dengan demikian program pemberdayaan harus lebih mengarah pada kesadaran untuk meningkatkan kualitas hidup yang bermartabat. Titik tekan program pemberdayaan harus mampu menghapus stigma negatif masyarakat tentang pengamen tersebut. Aktivitas yang tidak relevan dengan program kebijakan berpotensi menyebabkan implementasi program tidak memberdayakan tapi justru menciptakan kemarjinalan masyarakat (Firdaus, et al., 2023).

Hakekat justifikasi masyarakat terhadap pengamen eksentrik karena merasa prihatin atas dampak negatif yang mungkin saja timbul, terutama terkait ancaman eksploitasi atau kemananan, pendidikan dan kesejahteraan anak-anak, serta kebersihan maupun kenyamanan kawasan publik. Orang yang banyak menghabiskan waktu di jalanan rentan berhadapan dengan situasi buruk dan eksploitasi, misalnya kekerasan fisik, penjerumusan tindak criminal, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, dan lain-lain. Implementasi program pemberdayaan pemerintah sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat atau kelompok pemerintah, dan swasta untuk mencapainya tujuan yang ditetapkan (Hidayat, et al., 2023). Parsons (dalam Septriana, et al., 2024) menyatakan dalam proses formulasi program kebijakan, harus bisa mendefinisikan masalah dengan benar dan jelas agar memastikan jika program yang diusulkan dapat menyelesaikan masalah tersebut. Sebab fungsi implementor suatu program harus bisa mengeliminir permasalahan atau pelanggaran yang ditemui (Rippley dan Franklin dalam Salsabila, et al., 2024).

Hakekat pemberdayaan jika sesuai prinsip kehidupan bernegara, bahwa pemerintah sangat dibutuhkan untuk mengatur, mengayomi, serta memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Hadirnya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam menangani pengamen eksentrik, bertujuan agar semua wilayah, aktivitas, dan batas-batasnya bisa dikontrol dan diawasi dengan mudah. Noviana & Priyanto (2023) mengemukakan, implementasi program pemerintah adalah transformasi dari rencana ke praktik dalam mencapai suatu tujuan. Priyanto, et al. (2021) menjelaskan partisipasi masyarakat diperlukan dalam implementasi program pemerintah dalam pembangunan di segala bidang. Partisipasi semua pihak bisa berdampak kesejahteraan bagi masyarakat (Priyanto & Noviana, 2023). Peran pemerintah dalam pembangunan sebagai pihak perancang, penyelenggara, dan pembayar (Agustin, et al., 2025).

Upaya Pemerintah Dalam Penanganan

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi harus mampu menangani permasalahan aktivitas pengamen eksentrik yang mengkapitalisasi kesengsaraannya demi keuntungan pribadi dan mengganggu semangat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam penataan kota dan program pemberdayaan yang berkeadilan dan mensejahterakan. Sintesis peneliti pada penelitian ini disesuaikan dengan prinsip implementasi kebijakan sebagaimana pemikiran Smith (1973) yang terdiri dari kebijakan yang diinginkan, kelompok sasaran, organisasi pelaksana, dan faktor-faktor lingkungan.

Pertama, kebijakan yang diinginkan. Kebijakan adalah interaksi pemerintah dengan masyarakat. Smith (1973) menyatakan, kebijakan yang diidealkan adalah pola interaksi ideal yang didefinisikan oleh perumus kebijakan yang berusaha diinduksikan kepada kelompok sasaran untuk melaksanakannya. Kebijakan efektif adalah kebijakan yang diimplementasi (Efendi, et al., 2025). Implementasi adalah penghubung antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah, yang melibatkan pihak berkepentingan.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memiliki kebijakan yang tujuannya menangani masalah kemiskinan serta masalah sosial lainnya (hasil wawancara, 2025).

Tabel 2 Regulasi Daerah Dalam Penanggulangan Kemiskinan

No	Jenis Kebijakan	Keterangan
1	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan	Strategi dan Program Penanggulangan Kemiskinan
2	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Merupakan bagian upaya untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
3	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Non Kuota Kabupaten Banyuwangi	Memberi Jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin
4	Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Program Rantang Kasih	Bantuan makanan bagi Lansia demi trmenuhi kebutuhan dasar
5	Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018 tentang Program Bantuan Sosial Tabungan Gerakan Daerah Angkat Anak Muda Putus Sekolah	Bantuan biaya pendidikan untuk anak-anak tidak mampu putus sekolah
6	Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 tentang Program Kanggo Riko	Percepatan Penanggulangan di Kabupaten Banyuwangi
7	Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Jemput Bola Rawat Warga Kabupaten Banyuwangi	Meningkatkan akses pelayanan Kesehatan dan pemerataan pelayanan kesehatan
8	Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Program Siswa Asuh Sebaya	Meringankan biaya Pendidikan bagi teman sekolah yang tidak mampu
9	Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2013 tentang Program Banyuwangi Cerdas	Beasiswa mulai pendidikan dasar hingga perguruan tinggi

Sumber: Analisis peneliti (2025)

Berbagai kebijakan tersebut sebagai pertanda legitimasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai pihak berwenangan dalam menciptakan struktur sosial yang mendukung interaksi positif antar masyarakat, dan sebagai solusi berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan aspek kemanusiaan dan nilai sosial yang ada. Kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat (Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 2 tahun 2020).

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi secara rutin dan konsisten mengimplementasi program penanganan pada pengamen eksentrik, dengan maksud keamanan, kentruman, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana ditetapkan dalam perencanaan dapat di implementasi serta mencapai target yang diinginkan (hasil wawancara, 2025).

Tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan di daerah demi tercipta keamanan, kentruman, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Niat baik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam membentuk dan mengimplementasi kebijakan sebagaimana harapan masyarakat patut di apresiasi. Sebab menyelesaikan masalah kemiskinan sebagaimana ditampakkan pengamen eksentrik bukan hal yang mudah. Selain setiap program memiliki keterbatasan waktu dan anggaran, bahwa pengamen eksentrik kerap kembali beraktivitas ketika pemerintah belum menyediakan alternatif pekerjaan, yang pada satu sisi ada kebutuhan hidup yang harus tercukupi

Keberadaan pengamen eksentrik sesungguhnya dipengaruhi kompleksitas masalah sosial dan ekonomi, seperti kemiskinan, kurangnya akses ke pendidikan, dan peluang kerja yang terbatas. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 2 tahun 2020 perlu menggunakan pendekatan yang holistik dan menyediakan dukungan yang relevan, seperti pelatihan keterampilan dan akses kepada layanan sosial, sehingga pengamen eksentrik dapat meningkatkan kualitas hidup dan berkontribusi positif dalam masyarakat tanpa stigma yang negatif. Membentuk keberhasilan implementasi program kebijakan harus disertai kualitas pemahaman dan kepatuhan aparatur saat implementasi, serta di tunjang partisipasi, monitoring, dan evaluasi (Ramadan, et al., 2024).

Kedua, Kelompok sasaran, adalah pihak yang di harapkan mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan perumusan kebijakan (Smith, 1973). Pengamen eksentrik sebagai kelompok sasaran punya pengaruh besar pada tercapai atau tidaknya tujuan kebijakan, sebab bisa menolak atau menerima program kebijakan yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Kelompok sasaran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 2 tahun 2020 adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat.

Penelitian lapangan menjelaskan, pengamen eksentrik yang dibina mendapat diarahkan untuk mengikuti program pembinaan dan pemberdayaan yang dikelola oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (hasil wawancara, 2025).

Tabel 3 Program Penanggulangan Kemiskinan Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Tahun 2024

No	Jenis Program
1	Program perlindungan dan jaminan sosial
2	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota
3	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota
4	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial
5	Rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya bukan program HIV/AIDS dan napza di luar panti sosial.
6	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota
7	Program rehabilitasi sosial
8	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
9	Pelebagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota
10	Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat daerah kabupaten/kota
11	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota
12	Program peningkatan kualitas keluarga
13	Program pemenuhan hak anak
14	Program perlindungan khusus anak
15	Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota
16	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus
17	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera
18	Pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (2025)

Program Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk menangani masalah masyarakat Banyuwangi, diantaranya pengamen eksentrik, agar tidak semakin bertambah dalam jangka waktu yang cukup panjang, karena aspek kemiskinan, pengaruh lingkungan, dan sebagainya. Meski demikian perlu dipahami, implementasi program harus disertai komunikasi efektif sehingga membentuk kepatuhan kelompok sasaran kebijakan. Rendahnya komunikasi dan kolaborasi dapat mengurangi keberhasilan implementasi kebijakan, karena kepatuhan kelompok sasaran dipengaruhi isi atau program kebijakan (Dinasty, et al., 2025). Program penanganan pengamen eksentrik harus terbuka agar muncul partisipasi masyarakat untuk mendukung program pemerintah.

Selain daripada itu, program menangani pengamen eksentrik sebagai kelompok sasaran memerlukan organisasi yang terstruktur dengan baik. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi harus mampu bersinergi dengan lembaga sosial dan komunitas lokal, sehingga program yang dilaksanakan dapat menangani permasalahan terkait keberadaan pengamen eksentrik, sekaligus memastikan jika interaksi sosial tetap harmonis dan produktif. Sebagaimana pendapat Ripley dan Franklin (dalam

Sukma, et al., 2023), terdapat 3 aspek untuk mencapai keberhasilan implementasi: tingkat kepatuhan setiap tingkatan birokrasi, adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah, serta pelaksanaan dan manfaat yang dikehendaki.

Ketiga, aspek organisasi pelaksana. Suatu implementasi akan terjadi apabila ada organisasi pelaksana yang didalamnya ada aparatur yang bertanggung jawab dalam implementasi. Smith (1973) menjelaskan organisasi pelaksana sebagai perlakuan atau pelaksanaan dari rencana yang dirangkai secara matang dan detail, dan telah dianggap siap. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagai organisasi pelaksana punya 3 komponen penting: struktur dan personil pimpinan organisasi, administrasi dan pelaksanaan program, serta kapasitas.

Hasil penelitian menjelaskan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam menyelesaikan permasalahan pengamen eksentrik yang beraktivitas di Kawasan publik secara liar, berkolaborasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan pihak lain yang berkepentingan (hasil wawancara, 2025).

Aktivitas pengamen eksentrik di kawasan publik mengganggu keindahan kota dan kenyamanan kehidupan bermasyarakat. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagai kelembagaan pemerintah memiliki tugas krusial dalam menangani isu pengamen eksentrik di kawasan publik Banyuwangi. Meski demikian, perlu kolaborasi karena menangani pengamen eksentrik merupakan tanggung jawab berbagai pihak. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 2 Tahun 2020, penanganan kemiskinan adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Kelembagaan pemerintah harus mampu mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat, demokratis dan tidak bersikap dominan demi mencapai keberhasilan (Pitaloka, et al., 2024).

Memutus benang merah aktivitas pengamen eksentrik yang mengkapitalisasi kesengsaraan demi keuntungan pribadi serta mengganggu program pemerintah dalam penataan kota dan program pemberdayaan merupakan hal penting. Sesuai penelitian lapangan, *traffic light* adalah lokasi strategis pengamen eksentrik dalam beraktivitas, sehingga kerap dilakukan razia (hasil wawancara, 2025).

Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menertibkan dan mengamankan kawasan publik bertujuan memberi pembinaan, bimbingan, serta motivasi agar pengamen eksentrik dapat meningkatkan kualitas hidup lebih baik lagi dan lebih layak dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Terdapat 3 hal yang dilakukan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana: 1) Penanganan preventif, usaha sistematis yang meliputi penyuluhan, bimbingan pendidikan dan pelatihan kerja, serta pengawasan; 2), Penanganan responsif, yaitu upaya kolaborasi dengan lembaga maupun non lembaga melalui program pembinaan atau pemberdayaan; dan 3) Penanganan rehabilitas, yaitu usaha pemberian pendidikan dan pelatihan kerja, pemulihan kemampuan dan pengembalian pada lingkungan, pengawasan serta pembinaan secara berkelanjutan.

Keempat, faktor-faktor lingkungan. Aspek ini menjelaskan jika tiap implementasi berpotensi mengalami kendala. Menurut Smith (1973), lingkungan budaya, sosial, ekonomi dan politik mempengaruhi implementasi kebijakan.

Berbagai pihak menganggap aspek sosial dan ekonomi menjadi penyebab maraknya pengamen eksentrik, sehingga menjadi masalah bagi pemerintah dan masyarakat umum (hasil wawancara, 2025).

Menurut peneliti, fenomena tersebut karena perkembangan budaya yang bergeser dan menyimpang, baik karena arus informasi yang cepat dan/atau masalah lingkungan keluarga atau masyarakat. Secara historis, kehadiran pengamen memang sangat melekat dengan citra rakyat kecil (Bennet & Rogers, 2014). Namun demikian, mengamen di *traffic light* dapat mengganggu aktivitas pengguna jalan dan bisa menyebabkan gangguan ketertiban dan kenyamanan, sehingga fungsi jalan tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya, bahkan menjadi penyebab kemacetan serta berisiko terjadinya kecelakaan.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkepentingan mengembalikan pengamen eksentrik ke individu sebagaimana mestinya, serta menawarkan pengembangan diri agar memiliki kualitas hidup yang lebih baik dan memiliki daya saing (hasil wawancara, 2025).

Peneliti berpendapat, peran dan strategi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam menangani pengamen eksentrik adalah pola pemberdayaan, dan bentuk pembinaan agar menghentikan aktivitasnya sebagai pengamen. Sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 2 tahun 2020, pembinaan harus dilakukan terorganisir dan terencana, sehingga mencegah munculnya penyandang penyakit sosial dalam masyarakat, dan untuk meningkatkan taraf hidup. Sesuai stigma masyarakat, pengamen eksentrik identik dengan pengemis. Dengan demikian strategi pembinaan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana pada pengamen eksentrik tidak sebagai rutinitas kerja semata, tetapi menjadi program pembinaan yang bisa diterima, dipahami, dan didukung.

KESIMPULAN

- a. Pengamen eksentrik muncul sebagai bentuk adaptasi atas kondisi ekonomi yang sulit, namun kerap menimbulkan gangguan ketertiban dan stigma negatif, karena aktivitasnya tidak semata-mata kemiskinan, tapi pilihan karena fleksibilitasnya.
- b. Pada aspek kebijakan yang diinginkan, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah memiliki regulasi dan program penanggulangan kemiskinan yang komprehensif, namun implementasinya perlu sinergi dan fokus pada pemberdayaan yang nyata agar efektif mengatasi masalah pengamen eksentrik.
- c. Pada aspek kelompok sasaran, bahwa pengamen eksentrik memiliki peran penting dalam keberhasilan program, sehingga pendekatan persuasif, komunikasi efektif, dan partisipasi aktif sangat dibutuhkan agar terbentuk kepatuhan pada kebijakan.
- d. Pada aspek organisasi pelaksana, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berperan sebagai pelaksana utama dengan dukungan

- instansi terkait, namun efektivitas pelaksanaan bergantung pada struktur organisasi yang solid, kolaboratif, dan responsif terhadap dinamika sosial.
- e. Pada aspek lingkungan, bahwa keberadaan lingkungan sosial, ekonomi, budaya, dan keluarga sangat memengaruhi maraknya pengamen eksentrik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Eka Nanda., Hary Priyanto, & Safrieta Jatu Permatasari. (2025). Metal Children Of Port Ketapang: The Reality Of Poverty In The Implementation Of Sustainable Development. *International Journal of Social Science, Educational, Economics, Agriculture Research and Technology (IJSET)*, 4(2), 347–358. Doi: 10.54443/ijset.v4i2.671.
- Anjarwati, Desy Dwi., Hary Priyanto, Niko Pahlevi Hentika. (2023) Kajian Implementasi Program Banyuwangi Tanggap Stunting Di Pusat Kesehatan Masyarakat Desa Wonosobo Kecamatan Srono. *Al-Mikraj: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*. 4 (1). Doi: 10.37680/almikraj.v4i1.3568.
- Azizah, Fahreza Nur., Sri Wilujeng, & Hary Priyanto. (2025). Optimalisasi Pelayanan Publik Melalui Pendekatan Kolaboratif Triple Helix: Suatu Identifikasi Dan Mengatasi Patologi Pelayanan Kependudukan Di Desa Sukomaju. *Nusantara Hasana Journal*, 4(8), 92–103. Doi: 10.59003/nhj.v4i8.1310.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi. Profil Kemiskinan Maret 2024 Kabupaten Banyuwangi.
- Bennett, A., & Rogers, I. (2014). Street music, technology and the urban soundscape. *Continuum*, 28(4), 454-464.
- Dinasty, Puja Aulia., Hary Priyanto, & Niko Pahlevi Hentika. (2025). Perlindungan Perempuan Bawah Umur Dari Perilaku Pedofilia: Suatu Penerapan Model Kolaborasi Pentahelix. *Nusantara Hasana Journal*, 4(10), 40–53. Doi: 10.59003/nhj.v4i10.1385.
- Efendi, I., Priyanto, H., & Pahlevi Hentina, N. (2025). Analisis Kontradiksi Aktivitas Prostitusi Di Eks. Lokalisasi Pakem, Banyuwangi. *Katarsis*, 2(2), 85–95. Doi: 10.62734/kts.v2i2.567.
- Ekawati, E. P., Priyanto, H., & Agustina, E. (2024). Dampak Kualitas Implementasi Aparatur Desa Kepundungan Pada Program Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 13038–13052. Doi:10.31004/innovative.v4i1.10592.
- Firdaus, R., Priyanto, H., & Agustina, E. (2023). Critical Study On Policy Implementation Of Withdrawal Of Provincial Road Retributions By The Government Of Tamansari Village Based On Government Regulation 97/2012. *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)*, 7(2), 306- 312.
- Habibullah, M. S., Law, S. H., & Dayang-Afizzah, A. M. (2008). Defense Spending And Economic Growth In Asian Economies: A Panel Error-Correction Approach.
- Hidayah, E. S. (2020). Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis Dan Pengamen Di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 84-97.

- Hidayat, N. A. P., Priyanto, H., & Agustina, E. (2023). Study Of Online Single Submission-Based Integrated Service Implementation In Banyuwangi District. *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS)*, 3(5), 1496-1503. Doi: 10.54443/ijerlas.v3i5.1030.
- Kembuan, T. Y., Matheosz, J. N., & Pratikno, M. H. (2021). Kehidupan Pengamen Jalanan Di Kawasan Boulevard Kota Manado. *Holistik, Journal Of Social And Culture*.
- Madhanian, I., Priyanto, H., & Hentika, N. P. (2023). Analisis Pada Upaya Pengentasan Masyarakat Miskin Melalui Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Pesucen Kabupaten Banyuwangi. *Nusantara Hasana Journal*, 3(3), 145-155. Doi: 10.59003/nhj.v3i3.975.
- Marzali, A. (2016). *Antropologi & Pembangunan Indonesia*. Prenada Media.
- Nugraha, Reza Akbar, et al. Analisis Hukum Eksploitasi Anak Sebagai Pengamen dan Pengemis (Studi Tentang Peran Serta Tanggung Jawab Orang Tua). *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2023, 1.1: 11-11.
- Nazah, F. M. (2020). Implementasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2015 Kota Tasikmalaya Tentang Penyelenggaraan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern (Studi Kasus Dalam Pembangunan Transmart Di Kota Tasikmalaya) (Doctoral Dissertation, Universitas Siliwangi).
- Nisrina, A. (2024). Peran Pemerintah Kabupaten Ponorogo Dalam Penanggulangan Pengemis Dan Pengamen Perspektif Siyâsah Dusturiyâh. *Jurnal Antologi Hukum*, 4(1), 1-20.)
- Noviana, N., & Priyanto, H. (2023). Proactive Personality a Transformational is Consistent in Maintaining Organizational Balance. *Partners Universal International Research Journal*, 2 (2). Doi: 10.5281/zenodo.8051223.
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020, Tentang: Penanggulangan Kemiskinan.
- Pitaloka, N. R. A., Imaniar, D., & Priyanto, H. (2024). Intensitas Badan Permusyawaratan Desa Wongsorejo Dalam Mewujudkan Good Governance. *Al-Mikraj: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 4(02), 2745-4584, Doi: 10.37680/almikraj.v4i02.4890.
- Permatasari, SJ. 2022. Pengembangan Program Desa Wisata Berbasis Jejaring Bisnis Di Desa Tamansari Kabupaten Banyuwangi. *Governance, JKMP*. 12(2): 133-139. Doi: 10.38156/gjkmp.v12i2.107.
- Pratiwi, N. E., Rahayu, S., & Priyanto, H. (2024). Fungsi Pemerintah Dalam Penanganan Pengemis Dan Pengamen Anak Di Kecamatan Banyuwangi. *Jurnal Katarsis*, 1(2).
- Priyanto, H., Soepeno, B., Wahyudi, E., & Hara, A. E. (2021). Public Services in Banyuwangi Regency, East Java, Indonesia in a Just and Civilized Humanity Perspective. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 4(4). 2615-3076. Doi: 10.33258/birci.v4i4.3494.
- Priyanto, H., & Noviana, N. (2023). Intersubjektif Keadilan Dalam Implementasi Pelayanan Publik Di Kabupaten Banyuwangi. *Majalah Ilmiah Dian Ilmu*, 22(2). Doi: 10.37849/midi/v22i2.330.
- Priyanto, H. (2023). The Quality of Education for the People of Banyuwangi: Analysis Study of the Banyuwangi Cerdas Program. *Qalamuna*



- Journal, 15(2), 1007-1018. Doi:10.37680/qalamuna.v15i2.3788.
- Priyanto, H. (2024). Public Service Quality in Banyuwangi Distric: A Study in Welfare Perspective. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 8(1). Doi: 10.24198/jmpp.v8i1.48657.
- Priyanto H, & Hentika NP. (2024). Collaborative Penta Helix Stakeholders Dalam Pembangunan Inklusi Yang Berkelanjutan; Suatu Diskursus Mencapai Keadilan Dan Kesejahteraan Bagi Penyandang Disabilitas. *Majalah Ilmiah Dian Ilmu*. 24(1): 67-87. Doi: 10.37849/midi.v24i1.404.
- Ramadan, Iqbal., Hary Priyanto, & Herwin Kurniadi. (2024). Bulurejo-Banyuwangi Village Fund Postulate As Supporting The Effectiveness Of Empowering Pre-Prosperous Communities. *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)*, 8(1). Doi: 10.36526/santhet.v8i1.3973.
- Rubicnews (2025, 25 April). Pengamen Penari Gandrung Ditertibkan Satpol PP dan Diamankan ke Shelter Pemerlu Atensi Sosial, Mengaku Dalam Sehari Meraup Hingga Rp 1 Juta. Retrieved from <https://www.rubicnews.com/berita/45314968428/pengamen-penari-gandrung-ditertibkan-satpol-pp-dan-diamankan-ke-shelter-pemerlu-atensi-sosial-mengaku-dalam-sehari-meraup-hingga-rp-1-juta>
- Safinah, Kuni Putri., Hary Priyanto, & Safrieta Jatu Permatasari. (2024). Aksentuasi Aparatur Desa Dalam Pencegahan Dan Penurunan Stunting Di Banyuwangi. *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)*, 8(1), 458-465. Doi: 10.36526/santhet.v8i1.3527.
- Salsabila, A. ., Priyanto, H. ., & Vitasari, L. (2024). Kolaborasi implementasi program BPNT dalam penanganan kemiskinan di Desa Karetan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi. *Katarsis*, 1(3), 14-25. Doi: 10.62734/kts.v1i3.280.
- Septriana RV, Priyanto H, Vitasari L. (2024). Quality of Representation Women Legislators in the Manifestation of Public Policy Formation in Banyuwangi: Uthopis or Prosperity?. *JOELS: Journal of Election and Leadership*. 5(2): 161-171. Doi:10.31849/joels.v5i2.22406.
- Smith, TB. (1973). Proses Implementasi Kebijakan. *Ilmu Kebijakan*, 4,197-209.
- Sutikno, S., Priyanto, H., & Pahlevi Hentika, N. (2025). Pelayanan Publik Dalam Tranformasi SAKIP Pada Pemerintah Kecamatan Bangorejo. *Katarsis*, 3(1), 28–37. Doi: 10.62734/kts.v3i1.572.
- Shiddiqi, Izzul Haque Ash., Leni Vitasari, & Hary Priyanto. (2024). Strategi Komunikasi Calon Legislatif Muda Pada Pemilu DPRD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024. *Nusantara Hasana Journal*, 4(3), 64–77. Doi: 10.59003/Nhj.V4i3.1199
- Sukma, Rosa Amelia., Harry Priyanto, & Herwin Kurniadi. (2023). Home Review Program In The Interest Of Poverty Reduction: Towards Success Or The Verse? *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS)*, 3(6), 1870–1876. Doi: 10.54443/ijerlas.v3i6.1147.
- Utami, S. D., Bahri, S., & Priyanto, H. (2023). Implementasi Administratif: Kapasitas Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Pembinaan Dan Penyuluhan Pada Pedagang Kaki Lima. *Jurnal Katarsis*, 1(1).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



- Zakiyah, I. H., & Priyanto, H. (2024). Analisis Inovasi Ekonomi Kreatif Usaha Homestay Di Desa Tamansari Kabupaten Banyuwangi: Suatu Pemberdayaan Efektif atau Eksistensi Proyek Pemerintah Desa?. *Majalah Ilmiah Cahaya Ilmu*, 6(1), 2715-3339. Doi: 10.37849/mici.v6i1.406.
- Zaki, Muhammad. (2013). Perlindungan Anak Dalam Prespekif Islam, *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 6 (2).